

**Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

*Handwritten signature and date:*  
13/3 2025

**Ghaida Nur Aziza Fauzia Susanto, Endang Larasati Setianingsih**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

The Child Identity Card (KIA) is a policy implemented by the government to provide official identification for children under the age of 17. This policy aims to improve population data registration, facilitate children's access to public services, and provide legal protection and recognition. However, in its implementation in Semarang City, the KIA program still faces challenges such as low public awareness, ineffective socialization, and limited human and financial resources. This study aims to evaluate the KIA policy in Semarang City using William Dunn's policy evaluation approach, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research employs a qualitative method with a case study approach at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Semarang City. Data collection techniques include in-depth interviews with Disdukcapil officials, observations, and policy document analysis. The findings indicate that the KIA policy has provided benefits for population administration and increased children's identity ownership. However, several challenges remain in its implementation. The "jemput bola" program, which involves proactive outreach to schools, has improved KIA ownership coverage but has not yet reached the optimal target. Some obstacles to the policy implementation include a lack of coordination between Disdukcapil and healthcare facilities or other relevant institutions, as well as insufficient public understanding of the importance of KIA. The study concludes that although the KIA policy in Semarang City has had a positive impact, further improvements are needed to enhance its effectiveness. Therefore, it is recommended that the government increase the budget for KIA production and distribution, expand socialization efforts through a community-based approach, and develop digital innovations in population administration services to make KIA registration more accessible to the public.

**Keywords: Policy Evaluation, Public Policy, Child Identity Card, Disdukcapil Semarang City**

## **ABSTRAK**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan identitas resmi bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendataan kependudukan, mempermudah akses anak terhadap layanan publik, serta memberikan perlindungan dan pengakuan hukum. Namun, dalam implementasinya di Kota Semarang, program KIA masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KIA di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Disdukcapil, observasi, serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KIA telah memberikan manfaat bagi administrasi kependudukan dan meningkatkan kepemilikan identitas anak, tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Program jemput bola yang dilakukan ke sekolah-sekolah telah meningkatkan cakupan kepemilikan KIA, namun belum mencapai target optimal. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya koordinasi antara Disdukcapil dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait lainnya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KIA. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KIA di Kota Semarang telah memberikan dampak positif, masih diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek agar implementasinya lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk produksi dan distribusi KIA, memperluas cakupan sosialisasi dengan pendekatan berbasis komunitas, serta mengembangkan inovasi digital dalam layanan administrasi kependudukan agar pendaftaran KIA lebih mudah diakses oleh masyarakat.

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Kartu Identitas Anak, DISDUKCAPIL Kota Semarang**

## **PENDAHULUAN**

Administrasi kependudukan merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan untuk menjamin hak dan status hukum warga negara. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif. Berdasarkan Sensus Penduduk 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 281,6 juta jiwa, sehingga menuntut optimalisasi sistem administrasi kependudukan.

Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bertanggung jawab dalam pengelolaan identitas kependudukan, termasuk penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Akta Kelahiran. Namun, anak-anak di bawah 17 tahun belum memiliki identitas yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan kebijakan

penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 untuk menjamin hak sipil anak.

KIA bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pendataan kependudukan, serta kemudahan akses layanan publik bagi anak-anak. Kota Semarang menjadi salah satu pelaksana awal program ini, dengan tingkat kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 92,38% pada 2018. Implementasi KIA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan dan memastikan setiap anak mendapatkan hak identitas serta perlindungan hukum yang setara. Namun, meskipun program ini telah berjalan beberapa tahun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Beberapa permasalahan yang muncul meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA, keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, serta kendala teknis dalam pengelolaan data

kependudukan yang terintegrasi dengan SIAK. Selain itu, masih ditemukan kasus di mana anak-anak kesulitan memperoleh layanan publik meskipun telah memiliki KIA, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KIA di Kota Semarang guna mengidentifikasi pencapaian, tantangan, serta rekomendasi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi kependudukan bagi anak-anak.

Dalam Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian yang sebelumnya. Dimana memiliki fokus pada Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pada penggunaan teori yang dipakai juga berbeda dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu menurut William Dunn (2008:429) menyebutkan enam kriteria evaluasi yang bisa ditetapkan guna menilai keberhasilan suatu program atau

kebijakan publik, termasuk program yang dilakukan di instansi pemerintah, terdapat enam aspek, diantaranya: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Teori kedua yang digunakan yaitu Menurut Anderson dalam (Anggara, 2019) menjelaskan bahwa faktor penghambat terjadi karena sumber daya yang tidak mencukupi, cara implementasi yang tidak sesuai, masalah publik yang selalu terjadi, cara menanggapi aturan yang bisa mengurangi hasil kebijakan yang dicapai, namun ada tujuan-tujuan aturan yang tidak sebanding atau berhubungan satu sama lainnya, biaya yang dikeluarkan terlalu banyak, banyaknya masalah publik yang tidak terselesaikan, dan timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan serta sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran

yang sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian mengenai Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Adapun lokus tempat dan wilayah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kemudian terkait dengan fokus pada penelitian ini adalah belum tercapainya target KIA yang telah berjalan sejak tahun 2018 sehingga diharapkan mampu memberikan informasi lebih dalam menjawab penyebab permasalahan tersebut. Dalam studi ini, pemilihan informan akan digunakan teknik snowball sampling dengan key informan Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Semarang. Selain itu, digunakan teknik accidental sampling untuk warga (orang tua/wali pemilik KIA) yang dianggap relevan sebagai sumber data. Untuk pengumpulan data menggunakan jenis

data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan interpretasi data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menganalisis kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Semarang serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan yang memiliki keahlian serta pemahaman terkait topik penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi berdasarkan pernyataan informan selama wawancara. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, dengan wawancara sebagai sumber data utama yang didukung oleh data sekunder dari studi pustaka.

## **Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mulai melaksanakan program KIA, yang diatur oleh Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, pada 2018. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan ini dan seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai, setelah hampir 5 tahun pelaksanaannya.

### **a. Efektivitas**

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Semarang, dengan fokus pada pencapaian target, perlindungan hak konstitusional anak, peningkatan pendataan, dan peningkatan pelayanan publik. Implementasi KIA belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan Walikota Semarang, meskipun sosialisasi terus digencarkan. Masyarakat diharapkan memahami pentingnya KIA dan manfaatnya.

KIA bertujuan melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara, memberikan status resmi, dan memastikan kesetaraan akses layanan publik. KIA mempermudah identifikasi anak dalam sistem administrasi kependudukan (SIAK), terutama dalam kasus perceraian orang tua, anak hilang, atau kekerasan. Namun, sebagian masyarakat masih memandang KIA hanya sebagai identitas dan belum merasakan manfaatnya dalam pemenuhan hak konstitusional.

KIA menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendataan anak di bawah 17 tahun, sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. KIA mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang esensial untuk perencanaan pembangunan dan distribusi anggaran. Meski demikian, cakupan kepemilikan KIA masih belum mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD Kota Semarang. KIA diharapkan mempermudah anak dalam mengakses layanan publik, seperti membuka rekening bank atau layanan imigrasi. KIA berfungsi

menyederhanakan berkas persyaratan yang dibutuhkan saat mengakses pelayanan publik tertentu.

Secara umum, efektivitas kebijakan KIA di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pencapaian target kepemilikan dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Inovasi layanan dan kerjasama dengan pihak swasta serta OPD lain perlu terus dioptimalkan.

#### b. Efisiensi

Penelitian ini mengkaji aspek efisiensi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, dengan merujuk pada teori William Dunn yang melibatkan proses pembuatan KIA, waktu yang dibutuhkan, serta sumber daya manusia dan keuangan yang terlibat.

Pembuatan KIA di Kota Semarang mengikuti Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan penduduk anak usia di bawah 17 tahun. Pemerintah Kota Semarang berupaya

mengedukasi masyarakat melalui berbagai cara, termasuk layanan "jemput bola" yang langsung turun ke kelurahan, sekolah, dan tempat lain untuk menyosialisasikan pentingnya KIA. Selain itu, inovasi pelayanan seperti "*one service day*" juga diterapkan untuk mempercepat proses pembuatan KIA, meskipun ada keluhan terkait waktu tunggu yang cukup lama karena antrean dan keterbatasan pegawai.

Pembuatan KIA sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah tanpa membebani masyarakat dengan biaya apapun. Proses administrasi dan pencetakan KIA dilakukan tanpa biaya, dan pelayanan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, bahkan dalam satu hari. Anggaran yang ada sudah mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, kebijakan KIA di Kota Semarang dapat dikatakan efisien meskipun ada beberapa kendala terkait waktu tunggu dan jumlah pegawai yang terbatas. Namun, program ini tetap

memberikan kemudahan akses dan manfaat bagi masyarakat tanpa biaya.

#### c. Kecukupan

Penelitian ini mengkaji aspek kecukupan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, yang mencakup kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan anak secara efektif dan inklusif. Evaluasi ini melibatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta cakupan penerbitan KIA yang telah tercapai. Sarana dan prasarana di nilai sudah cukup baik sehingga, Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya memperluas cakupan layanan.

Kebijakan KIA di Kota Semarang telah mencapai kemajuan yang signifikan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencakup seluruh anak yang memenuhi syarat. Disdukcapil Kota Semarang telah mengupayakan sosialisasi dan pendataan melalui berbagai cara, seperti menjangkau

sekolah-sekolah dan panti asuhan, serta melakukan pendataan di tingkat kecamatan. Meskipun cakupan sudah mencapai sekitar 80%, masih ada tantangan dalam memastikan cakupan penuh, terutama terkait dinamika pertumbuhan populasi dan kelompok anak yang rentan atau terpinggirkan.

#### d. Perataan

Penelitian ini mengkaji aspek perataan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, yang bertujuan memastikan distribusi yang adil dan setara dalam penerbitan KIA tanpa diskriminasi. Fokus utama pada pemerataan adalah memastikan akses yang setara terhadap layanan administrasi kependudukan di berbagai wilayah dan kelompok sosial-ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau anak-anak di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses.

Disdukcapil Kota Semarang telah melaksanakan berbagai upaya untuk menjangkau seluruh anak, termasuk anak-anak dari keluarga kurang

mampu, daerah terpencil, dan penyandang disabilitas. Pendekatan menjemput bola melalui sekolah-sekolah dan program stunting untuk anak-anak yang tidak bersekolah, serta kerja sama dengan yayasan dan panti asuhan untuk menjangkau anak-anak telantar, merupakan strategi penting. Pendekatan ini bertujuan memastikan semua anak mendapatkan identitas resmi untuk mendukung akses layanan publik dan perlindungan hukum yang setara.

Sosialisasi kebijakan KIA dilakukan melalui berbagai media, seperti tatap muka di kelurahan dan kecamatan, serta penggunaan media sosial (seperti Instagram) dan pemasangan *x-banner* untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, terdapat kekurangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai manfaat KIA yang lebih luas, selain sebagai syarat pendaftaran sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu diperkuat dan disesuaikan dengan kelompok sasaran, terutama orang tua atau wali anak,

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KIA. Secara keseluruhan, kebijakan KIA di Kota Semarang telah melaksanakan pemerataan akses yang signifikan, namun masih membutuhkan peningkatan dalam sosialisasi dan strategi komunikasi untuk menjangkau semua kelompok masyarakat dengan efektif.

#### **Sosialisasi Kartu Identitas Anak ( KIA ) di Sekolah-Sekolah.**



#### **e. Responsivitas**

Evaluasi terhadap responsivitas kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menunjukkan kemudahan dalam pengurusan KIA, dengan sebagian besar masyarakat merasa puas. Proses pengurusan

dianggap sederhana, terutama dengan adanya layanan online, meskipun masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Namun, terbatasnya jumlah petugas menyebabkan antrean panjang, yang mengurangi efisiensi pelayanan.

Sebagian masyarakat merasa belum sepenuhnya memahami manfaat KIA, terutama di luar kepentingan sekolah. Mereka berharap adanya sosialisasi lebih lanjut tentang manfaat KIA dan promo-promo yang dapat meningkatkan pemanfaatannya, seperti kerjasama dengan tempat wisata. Tanggapan terhadap pelayanan menunjukkan bahwa meskipun pegawai memberikan layanan dengan baik, beban kerja yang tinggi seringkali menyebabkan kesalahan administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah berupaya responsif dengan melakukan sosialisasi intensif melalui sekolah, kelurahan, dan media sosial. Namun, aksesibilitas informasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang tidak memiliki

media sosial, sehingga pendekatan langsung masih diperlukan.

Secara keseluruhan, meskipun pelayanan KIA di Kota Semarang dinilai memadai, ada kebutuhan untuk peningkatan responsivitas, terutama dalam hal sosialisasi manfaat KIA dan penambahan jumlah petugas untuk mengurangi antrean.

#### f. Ketepatan

Aspek ketepatan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan tujuan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara. KIA memberikan identitas resmi kepada anak, yang memastikan akses yang adil terhadap layanan publik dan perlindungan hukum. Hal ini tercermin dalam kemudahan pendaftaran KIA melalui paket "3 in 1" yang mencakup akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA, yang kemudian terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Program KIA juga mendukung pemenuhan hak anak dalam situasi darurat dan administratif, seperti pendaftaran sekolah atau penanganan anak hilang. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan pihak sekolah memungkinkan proses pendaftaran KIA lebih efisien, dengan sistem jemput bola yang mengumpulkan data siswa untuk kemudian diserahkan ke Disdukcapil. Namun, meski sudah ada langkah-langkah positif, sosialisasi yang lebih efektif dan inovasi layanan perlu ditingkatkan. Kerja sama lebih luas dengan pihak swasta dan instansi lain diharapkan dapat memperluas manfaat KIA dan memastikan perlindungan hak anak tercapai secara optimal.

### **Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Menurut Anderson dalam Anggara (2019), evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, keterbatasan sumber daya, implementasi yang tidak

sesuai, ketidaksesuaian tujuan, tingginya biaya, serta munculnya dan berlarutnya masalah publik. Oleh karena itu, untuk memahami hambatan yang muncul dalam evaluasi kebijakan KIA, penting untuk menganalisis faktor-faktor tersebut.

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kekurangan staf menghambat proses pengurusan KIA dan kegiatan pendukung seperti sosialisasi. Agen pelaksana yang terampil dalam aspek teknis, administratif, dan komunikasi penting untuk memperlancar pelayanan. Namun, keterbatasan SDM dan jaringan memperlambat proses, meskipun sarana prasarana sudah memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakramahan agen pelaksana juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

## Kondisi Antrian Pada Loket



### b. Cara Implementasi

Implementasi kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menghadapi beberapa kendala operasional. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun telah dilakukan upaya seperti program jemput bola dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kelurahan, masih banyak keluarga kurang mampu yang belum mengakses informasi tentang KIA. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA menjadi penghambat utama.

Banyak orang tua yang menganggap KIA tidak penting dan cenderung menunda pengurusannya. Kebingungan terkait persyaratan untuk kelompok usia yang berbeda juga mempersulit proses. Meskipun demikian, agen pelaksana sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi.

### c. Menanggapi Kebijakan

Aspek tanggapan terhadap kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mencakup pemahaman dan respons masyarakat serta pelaksana. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat KIA menjadi salah satu hambatan utama. Banyak orang tua yang menganggap KIA hanya sebagai kartu identitas tanpa manfaat signifikan, terutama dalam kehidupan sehari-hari anak. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang efektif membuat tingkat pemahaman masyarakat rendah, sehingga respons terhadap kebijakan ini

juga rendah. Untuk meningkatkan keterlibatan, perlu ada kampanye edukasi yang lebih luas dan penyesuaian manfaat KIA yang lebih relevan.

Selain itu, kolaborasi antar instansi seperti dengan mitra kerja untuk memberikan manfaat tambahan seperti diskon belum sepenuhnya berjalan baik. Beberapa mitra belum menginformasikan manfaat tersebut ke masyarakat. Walaupun demikian, ada inisiatif paket 3 in 1 yang memudahkan ibu yang baru melahirkan mendapatkan dokumen kependudukan, termasuk KIA, yang sudah diterapkan di beberapa rumah sakit bekerja sama dengan Disdukcapil. Namun, meskipun ada kemudahan ini, pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA masih terbatas.

#### d. Tujuan Kebijakan

Kebijakan KIA di Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas hukum anak dan

mempermudah akses layanan publik. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, banyak masyarakat dan pelaksana teknis yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan kewajiban kepemilikan KIA.

KIA membantu administrasi kependudukan dan mendukung hak anak, namun banyak orang tua belum merasakan manfaatnya secara langsung. Kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan terbatasnya penggunaan KIA di layanan publik. Untuk efektivitas lebih, diperlukan edukasi lebih intensif dan perluasan fungsi KIA.

#### e. Biaya

Pelaksanaan kebijakan KIA di Kota Semarang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup pencetakan kartu, sosialisasi, dan pengelolaan administrasi kependudukan. Meskipun anggaran yang tersedia cukup untuk mencetak kartu, terdapat kendala dalam sosialisasi dan distribusi, terutama di

daerah terpencil. Program jemput bola dianggap solusi untuk meningkatkan akses, namun membutuhkan tambahan anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar dari APBD atau dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lain, serta optimalisasi distribusi dan sosialisasi agar manfaat kebijakan ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

## **Kesimpulan**

### **Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, yang dilaksanakan sejak 2018, memiliki berbagai pencapaian penting namun juga menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn, berikut adalah analisis mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan aspek-aspek dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang:

#### **1. Efektivitas**

**Keberhasilan:** KIA berhasil melindungi hak konstitusional anak, memberikan identitas resmi, dan mempermudah identifikasi dalam sistem administrasi kependudukan.

**Kegagalan:** Target kepemilikan KIA belum tercapai sepenuhnya, dan pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA selain fungsi administratif masih terbatas.

#### **2. Efisiensi**

**Keberhasilan:** Kebijakan KIA efisien karena biaya ditanggung pemerintah dan proses pembuatan KIA cepat.

**Kegagalan:** Waktu tunggu yang lama dan keterbatasan pegawai menyebabkan antrean panjang, yang mengurangi efisiensi operasional.

#### **3. Kecukupan**

**Keberhasilan:** Sarana dan prasarana cukup baik, dan partisipasi

masyarakat sudah tinggi. **Kegagalan:** Cakupan penerbitan KIA belum sepenuhnya mencakup anak-anak dari kelompok terpinggirkan atau daerah terpencil.

#### 4. Perataan

**Keberhasilan:** Kebijakan berhasil mendistribusikan layanan secara adil, terutama dengan pendekatan jemput bola ke daerah terpencil. **Kegagalan:** Sosialisasi masih belum cukup efektif menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang tidak menggunakan media sosial.

#### 5. Responsivitas

**Keberhasilan:** Proses pengurusan KIA dianggap mudah dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan. **Kegagalan:** Terbatasnya jumlah petugas menyebabkan antrean panjang dan ketidakpahaman masyarakat tentang manfaat KIA, membutuhkan peningkatan komunikasi.

#### 6. Ketepatan

**Keberhasilan:** KIA sesuai dengan tujuan perlindungan hak anak dan mendukung situasi darurat administratif. **Kegagalan:** Sosialisasi yang belum sepenuhnya efektif, serta perluasan kerja sama dan inovasi layanan.

Secara keseluruhan, kebijakan KIA telah menunjukkan keberhasilan dalam melindungi hak anak dan pemenuhan identitas resmi, namun masih menghadapi tantangan dalam mencapai cakupan penuh, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memperbaiki efisiensi dan responsivitas pelayanan.

### Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Evaluasi kebijakan KIA di Kota Semarang menghadapi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan. Pertama, **Sumber Daya Manusia (SDM)** yang terbatas menjadi kendala

utama. Kekurangan staf menghambat pengurusan KIA serta sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, dalam hal **Cara Implementasi**, meskipun ada upaya jemput bola dan kerjasama dengan berbagai instansi, rendahnya kesadaran masyarakat dan kebingungan terkait persyaratan menghambat proses. Ketiga, **Tanggapan terhadap Kebijakan** menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA, sehingga respon terhadap kebijakan ini rendah. Kolaborasi dengan mitra kerja juga belum sepenuhnya optimal dalam memberikan manfaat tambahan. Keempat, **Tujuan Kebijakan** meskipun telah ditetapkan, namun banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung dari KIA, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan terbatasnya penggunaan KIA di layanan publik. Terakhir, dari sisi **Biaya**, meskipun anggaran untuk pencetakan dan distribusi kartu tersedia, tantangan tetap ada pada keterbatasan anggaran untuk memperluas sosialisasi dan distribusi di daerah terpencil. Peningkatan alokasi

anggaran dan perluasan fungsi KIA sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Secara keseluruhan, faktor penghambat utama dalam evaluasi kebijakan KIA adalah kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan terbatasnya anggaran.

## **Saran**

Berdasarkan evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan:

### **1. Penyusunan Regulasi yang Lebih Kuat**

Pemerintah pusat dan daerah dapat mengusulkan peraturan yang mewajibkan KIA untuk mengakses layanan publik seperti pendaftaran sekolah dan layanan kesehatan.

### **2. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Menambah pegawai di Disdukcapil, memberikan pelatihan berkala bagi petugas, dan mengoptimalkan peran tenaga magang atau kontrak untuk mempercepat pelayanan.

### **3. Optimalisasi Implementasi Kebijakan**

Meningkatkan infrastruktur teknologi, memperluas penggunaan layanan digital, dan mengurangi antrean dengan sistem daring.

### **4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Melakukan sosialisasi lebih masif melalui media sosial, radio, televisi, dan kampanye langsung, serta menyampaikan manfaat praktis KIA kepada orang tua.

### **5. Memperkuat Kolaborasi Antar Instansi**

Meningkatkan kerjasama dengan sekolah, rumah sakit, dan sektor swasta untuk mempermudah

proses pembuatan KIA melalui layanan terintegrasi.

### **6. Pengembangan Layanan Inovatif**

Menerapkan sistem antrean online dan layanan pengiriman KIA ke rumah, serta mengembangkan aplikasi layanan kependudukan yang lebih user-friendly.

### **7. Peningkatan Anggaran dan Distribusi KIA**

Meningkatkan anggaran untuk mendukung program jemput bola dan memperbaiki distribusi KIA, terutama untuk wilayah terpencil.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan KIA dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Amelia, & Rizcah. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar.

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Akbar dan Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo. Ideas Publishing
- Barit, A. S. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah)* (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- Chrisanty, & Maesaroh. (2020). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang /23/Adm.Publik/2020.
- Hafiz, M., Hendrayady, A., & Edison. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. *Student Online Journal*, 1(2), 365. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/sojfisip/article/view/671/583>
- Husain, O. P., Abdussamad, Z., & Sulila, I. (2021). *The Effectiveness Of Population Administrative Document Service Delivery (Family Cards And Birth Certificates) In The Gorontalo City Department Of Population And Civil Registration*. *Public Policy Journal*, 2(1).
- Karniawati, N., Majid, Z. R., & Anindia, H. (2023). *Analyzing The Government Of Bandung City's Innovations In Population Services During The Covid-19 Pandemic*. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik Pemerintahan*, 6(1), 60-66.
- Keban. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Koraag, N., Sondakh, M., & Tangkudung, J. P. M. (2021). Peranan Komunikasi Antarpribadi Orangtua Dalam Mengantisipasi Tindak Kriminal Anak Remaja Di Desa Pineleng 1. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34913>
- Lailatulfitria, E. L. (2023). Efektivitas Program Gertak Dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Ipdn).
- Larasati, H., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 61-77.
- Maulana dan Nugroho. (2019). *Kebijakan Publik*. Banten. AA. RIZKY.

- Mulyadi, Dedi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Monica, S. D. (2022). Analisis Konsep Kebijakan Publik (Studi Kasus Bantuan Dana Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 155–166.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 69-87.
- Nurul Najidah Dan Hesti Lestari. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(2), 69–87.
- Novita, V. (2023). *The Quality Of Child Identity Card (Kia) Services During The Covid-19 Pandemic At The Population And Civil Registration Office Of Lebong Regency*. *Journal Of Social Research*, 2(7), 2124-2143.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pencatatan, I. A. (2020). Efektivitas Pencatatan Identitas Anak Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai. *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi* Vol, 2(1).
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 17.
- Rahmawati, A. (2019, September). *Implementation Of Public Service Innovation In The Idola Program In Sleman*. In *Proceedings Of The 1st International Symposium On Indonesian Politics, Sip 2019, 26-27 June 2019, Central Java, Indonesia*.
- Rahmawati, L. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017.
- Ratnawati, S., & Kurniawati, R. (2023). Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Pada Sistem Layanan Kependudukan Go Digital Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 14-27.
- Ristiawan, M., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Corporate

- Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina Di Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*,.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238-251.
- Siregar, A. R., & Salomo, R. V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 27–37.
- Sugiyono, D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Syafiie. (2017). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S., Rantung, M. I., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023, January). Implementation Of Child Identity Card (Kia) Policy In The Population And Civil Registration Service Of Bolaang Mongondow Timur Regency. In *Unima International Conference On Social Sciences And Humanities (Unicssh 2022)* (Pp. 1985-1993). Atlantis Press.
- Data BPS  
Disdukcapil Kota Semarang. 2024. Data Humas : Realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. Terkait Kartu Identitas Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Terkait Kartu Identitas Anak.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021.
- RPJMD Kota Semarang 2021-2026.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Terkait Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.